

Tinjauan Buku:

**FENOMENA “AYAM DEN LAPEH” DAN
MASALAH METODOLOGI**

Oleh: Andi Zaelani¹



Judul Buku : Mencari Indonesia 2 (Batas-batas
Rekayasa Sosial)
Penulis : Riwanto Tirtosudarmo
Penerbit : LIPI Press Jakarta
Cetakan : I, 2010
Tebal : xxviii+424 hlm.
ISBN : 978-979-799-498-3

Pengantar

Begitu membaca buku ini ada beberapa hal yang segera menyergap benak saya. Pertama, pencetakan buku ini yang kurang rapi, khususnya pada tampilan gambar-gambar agak “*blur*”. Seyogyanya penerbitan sebuah buku dengan isi yang berbobot juga didukung oleh pencetakan buku yang berkualitas pula. Kedua, judul buku tidak serta merta bisa menggambarkan isi keseluruhan buku. Ketiga, struktur bab-bab tidak tertata dengan baik mengesankan tidak ada hubungan antarbab sama sekali. Keempat, meskipun ada prolognya (Pendahuluan), yang walaupun terkesan penuh keraguan dan memaksakan tetapi mencoba memberikan “jembatan” yang menghubungkan antarbab-bab dalam buku ini, sayangnya buku ini tidak disertai dengan epilog yang bisa menjadi benang merah ide-ide dari bab-bab tersebut.

Berbeda dengan buku Mencari Indonesia jilid 1 yang terkesan sangat makro dan minimal data mikro (khususnya data etnografisnya). Buku yang dirensensi ini disana-sini membubuhkan data-data lapangan yang cukup menarik untuk mendukung tesis-tesis penulisnya. Salah satu

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI. Widya Graha, Lantai X. Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, e-mail: andy_az62@yahoo.com

pendekatan yang menarik dalam buku ini adalah menguraikan aktor-aktor yang berperan dalam fenomena pembangunan (*actor based model*), misalnya pada bab I. Saya teringat nasehat almarhum Prof. Masri Singarimbun, bila kita melakukan studi dengan mengumpulkan data-data lapangan, jangan melupakan untuk menganalisisnya dikaitkan dengan kondisi makro. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan studi makro, seyogyanya didukung oleh data-data mikro dari lapangan yang mendukung pokok-pokok pikiran kita.

Menurut saya, buku ini perlu diberikan acungan jempol sebagai usaha keras dari penulisnya. Walaupun demikian saya akan mencoba menyampaikan juga tinjauan yang sifatnya substansial maupun masalah metodologis yang barangkali bisa dijadikan perhatian bagi penulisnya dalam penulisan buku-buku berikutnya.

Fenomena “Ayam den Lapeh”

Berbagai konflik, kekerasan, korupsi gila-gilaan, hilangnya rasa malu para pejabat dalam melakukan korupsi maupun pelanggaran hukum (*guilty culture*), tiadanya lagi pemerintah yang bersungguh-sungguh mengayomi masyarakat, tiadanya lagi wibawa para penegak hukum dan hilangnya adat-adat yang dulu begitu dipatuhi masyarakat, meningkatnya pengangguran dan ancaman kuat globalisasi dirasakan banyak pihak sebagai mengaburnya identitas keIndonesiaan. Saya teringat, dulu ketika krisis ekonomi menerpa Indonesia diiringi dengan lengsernya Presiden Soeharto, rekan-rekan yang tinggal di luar negeri atau sedang studi atau berkunjung ke luar negeri enggan (malu?) mengaku sebagai orang Indonesia ketika ditanya berasal dari mana.

Merosotnya atau hilangnya kebanggaan terhadap negeri ini berdampak pada mengaburnya identitas ke-Indonesia-an. Orang pun sudah semakin sering berkata, “Ini negara tanpa ada pemerintahan.” Jati diri atau wawasan keIndonesiaan yang sejak dulu yang selalu didengung-dengungkan dengan penuh kebanggaan, kini mulai mengabur. Jati diri ke Indonesiaan kini rasanya mulai meninggalkan kita, meluncur lewat sela-sela jari kita. Bagaikan seekor ayam, dalam lagu lama Minangkabau: “Ayam den Lapeh”, dia lepas dari genggaman pemiliknya dan lari ke hutan yang dipenuhi pohon-pohon rimbun. O, betapa sulitnya mencari “ayam den lapeh” yang entah bersembunyi di balik pohon mana atau malah sudah disergap harimau. .

Mengembalikan jatidiri ke dalam dada tiap orang Indonesia di tengah tekanan globalisasi dan perdagangan bebas saat ini bukanlah hal yang mudah. Pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta terpenuhinya rasa keadilan masyarakat (*justice for all*), merupakan hal-hal dasar yang harus segera ditangani oleh bangsa ini secara bersama-sama. Globalisasi dan masuk dengan deras barang-barang impor, *life style* asing serta berbagai kultur asing membuat banyak orang makin gamang dengan identitas ke Indonesiaannya. Lebih tepatnya, orang makin kurang peduli lagi dengan keberadaan Indonesia sebagai negaranya.

Hal-hal dasar yang dikemukakan di atas tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah saja, karena sudah terbukti kelambanan dan kegagalan berbagai program-program yang ada. Pihak swasta dan masyarakat seyogyanya dimotivasi dan diajak untuk bahu membahu bersama pemerintah mengatasi hal-hal dasar tersebut.

Beberapa masalah utama yang terkait dengan “fenomena Ayam den Lapeh” yang perlu dicermati secara terus menerus dalam kehidupan berbangsa ini adalah: (i) Pembantu rumah tangga berhadapan dengan globalisasi, (ii) Desentralisasi: urbanisasi-urbanized, (iii) Pluralitas dan kemitraan.

1. Peran PRT Berhadapan dengan Globalisasi

Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT) yang walaupun sering dianggap sebagai kelas sosial rendah atau bahkan sebagian orang dengan sinis menyamakan dengan kasta paria, sesungguhnya merupakan *agent of social change* garis depan yang membawa pengaruh besar pada perkembangan masyarakat Indonesia. Pada awalnya dulu saya pikir mereka hanyalah mendorong perubahan sosial di desa, dengan *life style* dan aksesoris kekotaan ketika kembali ke desa pada saat-saat tertentu yang memungkinkan masyarakat desa menjadi lebih *urbanized* setidaknya dari sisi penampilan dan konsumsi (Zaelany, 1986).

Kemudian pendapat saya tersebut berubah pada medio decade 1980 an. Para PRT tersebut ternyata juga mempengaruhi anak-anak majikannya. Sebagai PRT mereka dalam beberapa kasus, dibandingkan orang tua anak-anak tersebut lebih intensif mengasuh dan bergaul dengan anak-anak majikan. Para PRT juga mentransfer nilai-nilai budaya kepada

anak-anak majikannya dan merubah pola interaksi tradisional yang feodal ke arah yang lebih egaliter. Anak-anak pejabat yang dalam kacamata budaya Jawa tergolong kelas priyayi, dengan gagah beraninya memasuki dunia bisnis yang pada periode sebelumnya dianggap tabu dan negatif (Zaelany, 1986). Masuknya anak-anak keluarga Cendana (Presiden Soeharto) yang diikuti oleh anak-anak menteri dan selanjutnya anak-anak pejabat di bawahnya dalam dunia bisnis yang sebelumnya dihindari oleh keluarga para pejabat merubah sosio kultural yang lama. Perubahan dari kultur priyayi ke kultur bisnis memang tidaklah mulus. Pola usaha bisnis yang dilakukan sangat mengandalkan fasilitas dari kekuasaan pemerintah dan belum menunjukkan kualitas *entrepreneurship* sejati, sehingga oleh banyak pihak mereka dicap sebagai *pseudo capitalism* dan hanya mengejar rente (*rent seeker*).

Ketika pasar tenaga kerja di luar negeri terbuka, berduyun-duyun perempuan Indonesia mencari kerja ke luar negeri, seperti ke negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, Hongkong, dan lain-lain. Pada awalnya orang tercengang, betapa bisa perempuan-perempuan Indonesia dengan budaya timurnya bisa melenggang begitu mudahnya kerja ke luar negeri dengan meninggalkan suami, anak dan keluarga besarnya. Bagi saya pribadi hal ini tidaklah mengherankan, tradisi bekerja sebagai PRT dengan meninggalkan desa serta keluarganya menuju kota besar dalam usia yang masih remaja sudah berjalan puluhan tahun (Zaelany, 2007).

Saya yakin bahwa mereka juga akan memainkan peran istimewa sebagai *agent of social change* yang akan membawa perubahan dahsyat pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mereka akan membawa kehidupan globalisasi dunia internasional ke dalam masyarakat Indonesia. Beberapa indikator yang sudah mulai terlihat diantaranya adalah pernikahan antarbangsa yang dilakukan orang-orang desa, meningkatnya kemampuan berbahasa asing, surat menyurat yang dilakukan orang desa dengan orang asing, kehidupan sehari-hari perdesaan yang kini semakin *urbanized* dan lain-lain.

Begitu besar peran PRT dalam perubahan sosial budaya yang sayangnya tidak diimbangi oleh perhatian pemerintah dalam perlindungan dan perbaikan nasib mereka. Kegagalan pemerintah sebagai pihak yang seyogyanya mengadakan kerja untuk warga masyarakat dan ketidakmampuannya dalam melindungi PRT berimbas pada nasib malang para PRT khususnya yang di luar negeri. Sudah sering kita dengar bagaimana para TKW kita disiksa, diperkosa dan bahkan dibunuh. Nasib

buruk ini ternyata dialami turun temurun disebabkan oleh kemiskinan. Seseorang yang menjadi PRT ataupun TKW dalam banyak kasus tidak bisa mengangkat diri mereka dan keluarga mereka dari jurang kemiskinan. Baru akhir-akhir ini adanya rencana pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan diantaranya memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), meningkatkan keahlian keluarga TKW dan sejumlah program lainnya yang sedang dipersiapkan.

2. Desentralisasi: Urbanisasi - Urbanized

Blunder terbesar dalam pembangunan di Indonesia adalah menumpuknya “gula-gula” pembangunan di Jakarta. Bangsa ini tidak pernah mau belajar dari sejarah bahwa pola pembangunan semacam itu akan menimbulkan eksese-eksese negatif yang begitu banyak dan potensial membawa bangsa ini ke arah kebangkrutan ekonomi bahkan kehancuran semua sendi kehidupan. Pada periode desentralisasi penumpukan pembangunan di daerah-daerah ada di ibu kota kabupaten atau kotamadya. Penumpukan pembangunan seperti itu pada waktunya kelak akan berakibat meningkatnya urbanisasi dan kerunyaman pembangunan. Ciri pembangunan semacam ini juga karena konsentrasi berlebihan dari pemerintah terhadap industrialisasi dan kurangnya perhatian pada pertanian. Dalam perjalanan sejarah republik ini, maju mundurnya perdesaan tidak pernah lepas dari pembangunan pertaniannya.

Di masa lalu begitu banyak pemberontakan bahkan daerah-daerah yang secara terang-terangan ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, seperti pemberontakan PRRI, Aceh, Papua dan lain-lain yang penyebabnya tiada lain adalah masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang hanya menumpuk di Jawa, khususnya di Jakarta. Jakarta pun kini bertumpuk manusia, gedung-gedung dan aktivitas ekonomi yang sudah melampaui *carrying capacity*-nya. Banyak pihak sudah mengisyaratkan mendesaknya ibukota dipindahkan. Suara paling santer saat sekarang ini adalah memindahkan sebagian kantor-kantor di Jakarta ke Jonggol.

Dalam pandangan saya sesungguhnya yang paling efektif adalah memindahkan sebagian besar “gula-gula pembangunan” di atas ke daerah-daerah. Ringkasnya, diperlukan pemerataan pembangunan Jawa – Luar Jawa, Jakarta – kota-kota kecil, dan kota–desa. Program transmigrasi bila dimodifikasi dengan baik saya kira bisa memainkan peran untuk membagi “gula-gula pembangunan” dengan membuka

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang penting bagi Indonesia sampai ke daerah-daerah terpencil. Saya kira penting untuk memperhatikan apa yang dikatakan Prof. Sayogyo tentang program transmigrasi (halaman 32) yang seharusnya dilepaskan dari kungkungan sempit birokrasi.

Hal lain yang merisaukan adalah kecenderungan semakin mengkota desa-desa (*urbanized*) yang ada dari berbagai sisi, khususnya dari *life style*, tingkat konsumsi dan kehidupan sehari-hari. Adat, bahasa daerah, kebiasaan gotong royong, arsitek lokal, dan kekhasan lokal lainnya semakin menghilang, dan desa-desa pun sudah hampir tidak ada bedanya dengan kota-kota, semakin homogen saja. Identitas diri (*self identity*) dari orang-orang desa semakin mengabur.

3. Pluralitas dan Kemitraan

Heterogenitas dalam masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang tak bisa diingkari. Begitu Indonesia merdeka, potensi dan sekaligus tantangan yang ada di depan mata ialah masalah pluralitas, baik dari sisi suku-suku bangsa, agama dan ideologi, kelompok-kelompok sosial masyarakat, orientasi politik khususnya partai, pola ekonomi yang masih tradisional berhadapan dengan ekonomi modernis, dan yang jelas kepentingan-kepentingan yang berbeda yang seyogyanya bisa diakomodir dalam kehidupan berbangsa.

Kemitraan merupakan sesuatu keniscayaan dalam kehidupan yang bercorak pluralitas seperti Indonesia ini. Kemitraan disini adalah membina hubungan-hubungan yang saling menguntungkan dan membesarkan antarkelompok-kelompok yang berbeda serta mengikutsertakan semua kelompok-kelompok tersebut dalam gerak kehidupan berbangsa. Konflik Poso, pertikaian panjang dan berdarah di Ambon, hilangnya rasa kemanusiaan pada peristiwa berdarah yang melibatkan suku Dayak dan Madura, dan lain-lain. Semua kejadian tersebut membuat kita miris akan masa depan Indonesia. Orang pun kini bertanya-tanya: “Apakah masih ada masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini ? Apakah masih ada dan berdiri negara kesatuan Indonesia ini 20 atau 30 tahun lagi ? Suara-suara untuk melakukan revolusi semakin sering terdengar.

Problema pluralitas juga terkait dengan wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh nusantara ini. Problema pendatang dan orang asli semakin memicu konflik-konflik kecil dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan pemilikan sumberdaya alam.

Problema perbatasan lebih sering menjadi pemicu konflik yang siap meletus dengan negara tetangga, seperti dengan Malaysia pada kasus Ambalat. Upaya membangun kemitraan pada kelompok-kelompok masyarakat maupun kemitraan dengan negara tetangga barangkali harus selalu diupayakan dengan format yang tentunya saling menguntungkan. Pernikahan antarsuku bangsa, pembauran antarkelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, menghindari pola pemukiman yang sifatnya segregatif baik secara suku bangsa, tingkat ekonomi maupun kelompok sosial; memberikan peluang-peluang dan kesetaraan semua pihak, mengembangkan pola pembangunan yang *bottom up* serta orientasi yang lebih bersifat meritokrasi merupakan upaya-upaya yang seyogyanya dijalankan untuk menghindari berbagai konflik dan ketegangan sosial lainnya (*social unrest*).

Prof. David Penny pernah berkata: "*kalau ingin mengetahui kebudayaan Indonesia, pahami sistem ekonomi dan politiknya; sebaliknya kalau ingin mengetahui sistem ekonomi Indonesia, pahami dulu politik dan kebudayaannya.*" Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang seperti itu, kini kondisi tersebut dihadapkan dengan tekanan globalisasi dan tuntutan peran serta masyarakat dalam semua aspek pembangunan yang menguat (*people centered development*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Amartya Sen (halaman 48), telah memporakporandakan banyak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang sudah baku selama ini. Bagaimana menata ulang (*reconstruction*) arah pembangunan yang beberapa waktu terakhir semakin tidak menentu arahnya, merupakan keharusan bagi bangsa ini bila tidak ingin terlindas roda globalisasi. Dampak globalisasi seperti bunuh dirinya ribuan petani di India maupun meningkatnya anarkhisme kelompok-kelompok masyarakat di dalam negeri menjadi ilustrasi buruk dari globalisasi yang harus diminimalisir oleh bangsa Indonesia.

Problema Metodologis

Problem yang mengganggu juga adalah masalah metode penulisan serta metode pengumpulan data dan analisis. Metode penulisan terlihat dengan struktur bab-bab yang sporadis, terserak begitu saja tanpa ada kaitan-kaitan yang jelas. Barangkali dalam buku yang mencoba mencakup banyak tema tersebut bisa dibagi dalam beberapa Bagian. Tiap Bagian terdiri dari beberapa bab yang mempunyai kaitan ide yang sama atau setidaknya berdekatan idenya. Struktur bukunya menjadi:

Prolog, BAGIAN 1 (bab 1,2,3...), BAGIAN 2 (bab.....), BAGIAN 3 (bab.....), Epilog.

Prolog menjadi payung dari ide-ide yang terdapat pada semua Bagian tersebut. Perspektif berpikirnya pun bisa dipecah-pecah dalam beberapa hal, walaupun diusahakan integrasinya. Epilog merupakan benang merah dari ide-idenya yang tertuang dalam buku itu dan bagaimana implikasi dan proyeksinya ke depan (*what next*).

Saya tidak punya gambaran bagaimana studi-studi yang menjadi dasar dari tulisan-tulisan di dalam buku tersebut dilakukan. Hanya saja saya ingin mengusulkan untuk menggunakan *mixed methodology*, sehingga tiap-tiap pokok pikiran tidak hanya didukung data-data kualitatif tapi juga data kuantitatif dari lapangan yang bermakna mendukung pokok-pokok pikiran tersebut (Tashakkori dan Tiddlie, 2010). Salah satu contohnya adalah mengombinasikan metode biografi, FGD, *semi structure interview* dan pengumpulan data-data sekunder. Dengan menerapkan metode biografi kita bisa memperoleh pemahaman misalnya dari keluarga seperti apa buruh migran tersebut (misalnya mereka yang ke Malaysia kebanyakan berasal dari keluarga buruh tani, mereka yang ke Taiwan dan Hongkong kebanyakan berasal dari anak-anak aparat desa, dll.).

Adapun metode analisis juga akan lebih “*rancah*” jika bervariasi. Sebaiknya analisisnya divariasikan dengan mengikutsertakan cara pandang dari para pelaku (*emic*) dan kategorisasi terminologi kerja secara kultural (Zaelany, t.t.). Pengutipan kalimat-kalimat langsung dari informan atau responden akan membuat tulisan-tulisan tersebut lebih segar dan membumi.

Di atas segalanya saya sangat berharap diseminasi buku ini lancar dan banyak dibaca pihak-pihak yang berkepentingan, karena informasi dan analisis di dalamnya aktual dan terkait langsung dengan sejumlah permasalahan pembangunan yang mendesak dituntaskan sekarang ini. Semoga !

Daftar Pustaka

Tashakkori, Abbas dan Teddlie, Charles. 2010. *Mixed Methodology*. Terjemahan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Zaelany, Andy Ahmad t.t. "Peran Tradisional Perempuan di Kalangan Masyarakat Nelayan: Kasus Pulau Barrang Lompo, Provinsi Sulawesi Tenggara". Artikel yang akan segera diterbitkan dalam *Jurnal Kependudukan*, Puslit Kependudukan LIPI, Jakarta
- Zaelany, Andy Ahmad. 1986. *Perjalanan Kultural Pembantu Rumah Tangga: Suatu Biografi Sederhana dari Minah*. Paper untuk tugas matakuliah perubahan sosial dari Prof. Dr.Umar Kayam, Yogyakarta: Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada
- Zaelany, Andy Ahmad. 2007. Politik Etika pada perubahan "male-female style". *Jurnal Psikologi No. 3*, Universitas Diponegoro, Semarang.